Rencana Aksi Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang dalam Akselerasi Pengarusutamaan Gender

Pendahuluan: Mengubah Paradigma, Infrastruktur Bukan Sekadar Beton dan Aspal

Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pengarusutamaan Gender (PUG) seringkali dianggap sebagai konsep yang abstrak dan lebih relevan untuk dinas-dinas sosial. Namun, paradigma ini harus diubah secara fundamental. PUG dalam konteks PUPR bukanlah beban administratif, melainkan inti dari praktik rekayasa dan pelayanan publik yang baik. Setiap jalan yang dibangun, jembatan yang disambungkan, sistem irigasi yang dialirkan, dan gedung publik yang didirikan memiliki dampak yang berbeda secara langsung terhadap kehidupan, keamanan, dan peluang ekonomi bagi perempuan, laki-laki, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Sebuah trotoar yang tidak rata dan tanpa jalur pemandu menjadi penghalang bagi ibu yang mendorong kereta bayi atau penyandang disabilitas. Sebuah jalan desa yang gelap tanpa penerangan yang memadai menjadi zona rawan bagi perempuan yang pulang bekerja di malam hari. Pasar yang dibangun tanpa toilet yang bersih, terpisah, dan aman, serta tanpa ruang laktasi, secara efektif membatasi partisipasi ekonomi perempuan. Oleh karena itu, mengintegrasikan PUG ke dalam setiap siklus proyek infrastruktur—mulai dari perencanaan, desain, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan—bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk mewujudkan visi pembangunan "Infrastruktur untuk Semua".

Laporan ini disusun sebagai panduan operasional bagi Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang untuk menerjemahkan setiap indikator dalam formulir penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) menjadi serangkaian aksi yang konkret, teknis, dan relevan. Dengan pendekatan ini, Dinas PUPR tidak hanya akan berkontribusi signifikan terhadap perolehan nilai APE kabupaten, tetapi juga akan menjadi pionir dalam menciptakan ruang-ruang publik yang lebih aman, adil, dan aksesibel bagi seluruh masyarakat Bengkayang.

Bab 1: Membangun Fondasi Kelembagaan PUG yang Kokoh

Sebelum melangkah ke aspek teknis infrastruktur, fondasi kelembagaan di internal Dinas PUPR harus diperkuat. Penilaian APE memberikan bobot yang signifikan pada prasyarat kelembagaan, yang mencakup kapasitas SDM, mekanisme kerja, dan ketersediaan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

1.1. Peningkatan Kapasitas SDM: Dari Insinyur menjadi Perencana Inklusif

Kompetensi PUG bagi staf PUPR bukan sekadar pemahaman konsep, melainkan kemampuan teknis untuk menerjemahkannya ke dalam desain dan spesifikasi. Insinyur, perencana, dan pengawas lapangan harus mampu mengidentifikasi bagaimana sebuah desain dapat menciptakan atau justru menghilangkan hambatan bagi kelompok pengguna yang berbeda. Ini sejalan dengan tuntutan APE pada Indikator I.2.1 yang mensyaratkan adanya SDM terlatih di setiap fungsi.

Rencana Aksi:

1. **Pelatihan Teknis Terapan:** Mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis internal dengan modul yang disesuaikan untuk PUPR. Materi harus fokus pada:
 - **Prinsip Desain Universal:** Memastikan semua infrastruktur dapat diakses dan digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas.
 - **Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Lingkungan (CPTED):** Memahami bagaimana elemen desain seperti pencahayaan, visibilitas, dan penataan ruang dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi rasa takut di ruang publik.
 - **Teknik Perencanaan Partisipatif:** Melatih staf untuk mampu memfasilitasi konsultasi publik yang efektif dalam menjangkau kebutuhan spesifik dari kelompok perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
2. **Studi Tiru dan Praktik Terbaik:** Mengirimkan staf kunci (terutama perencana dan perancang) untuk melakukan studi banding ke proyek-proyek infrastruktur yang telah berhasil menerapkan PUG, atau mengikuti seminar dan lokakarya yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR pusat.

1.2. Mengaktivasi Peran *Focal Point* PUG sebagai Penjaga Kualitas Desain

Penunjukan *Focal Point* PUG (sesuai Indikator APE I.2.3) di Dinas PUPR harus memiliki peran strategis sebagai "penjaga kualitas" atau *quality assurance* dari perspektif gender.

Rencana Aksi:

- **Integrasi dalam Alur Kerja:** *Focal Point* PUG harus dilibatkan secara formal dalam setiap tahapan *review* desain, mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), *Detail Engineering Design* (DED), hingga Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- **Menyusun *Checklist* Desain Responsif Gender:** *Focal Point* PUG, bekerja sama dengan bidang teknis, menyusun daftar periksa sederhana yang wajib diisi oleh perencana untuk setiap proyek. *Checklist* ini berisi pertanyaan-pertanyaan kunci seperti: "Apakah desain trotoar sudah dilengkapi *ramp*? Apakah lokasi halte/shelter memiliki penerangan yang cukup? Apakah desain toilet di fasilitas umum sudah terpisah dan aksesibel?"

1.3. Data Terpilah sebagai Kompas Pembangunan Infrastruktur

Bagi PUPR, data terpilah (Indikator APE I.3) bukan hanya tentang jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Data yang relevan adalah data tentang pola penggunaan, akses, dan kerentanan yang terkait dengan infrastruktur.

Rencana Aksi:

1. **Identifikasi Indikator Kunci:** Mengidentifikasi dan mulai mengumpulkan data terpilah yang relevan untuk perencanaan infrastruktur.
2. **Kemitraan Data:** Bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk data pola pergerakan, Polres untuk data titik rawan kejahatan, dan Dinas Kesehatan untuk data lokasi fasilitas kesehatan guna merencanakan rute dan akses yang aman dan efisien.
3. **Survei Kebutuhan Spesifik:** Sebelum merancang proyek besar (misalnya, penataan kawasan kumuh atau pembangunan pasar), lakukan survei kecil atau FGD untuk mengumpulkan data kualitatif tentang kebutuhan dan kekhawatiran spesifik dari perempuan dan kelompok rentan lainnya di lokasi tersebut.

Tabel 1: Contoh Indikator Kunci Data Terpilah untuk Dinas PUPR

Kategori	Nama Indikator	Satuan	Sumber Data Potensial
Aksesibilitas & Mobilitas	Jumlah perempuan/anak yang berjalan kaki ke sekolah/pasar	Orang	Survei, Data Desa/Kecamatan
	Waktu tempuh rata-rata perempuan untuk mencapai sumber air bersih	Menit	Survei, PAMSIMAS
Keamanan Publik	Jumlah titik jalan tanpa penerangan di area permukiman	Titik	Survei Lapangan, Laporan Masyarakat
	Jumlah laporan kejahatan/pelecehan di ruang publik (terpilah lokasi)	Kasus	Polres Bengkayang
Partisipasi Ekonomi	Jumlah pedagang perempuan di pasar yang dikelola Pemda	Orang	Dinas Koperasi & UKM, Perdagangan
Sanitasi & Kesehatan	Persentase rumah tangga (terpilah KK Perempuan) yang memiliki akses sanitasi layak	Persen (%)	Dinas Kesehatan, BPS
Partisipasi Proyek	Jumlah pekerja perempuan yang terlibat dalam program Padat Karya Tunai	Orang	Laporan Proyek

Bab 2: Mengintegrasikan PUG dalam Siklus Pembangunan Infrastruktur

Setelah fondasi kelembagaan kuat, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan PUG secara sistematis ke dalam setiap tahapan siklus proyek, mulai dari ide hingga

pemeliharaan. Ini adalah inti dari komponen "Penyelenggaraan PUG" dalam penilaian APE.

2.1. Perencanaan dan Desain Inklusif (PPRG)

Perencanaan adalah tahap paling krusial untuk memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan semua. Kesalahan desain pada tahap ini akan sulit dan mahal untuk diperbaiki. Penilaian APE menuntut adanya Analisis Gender yang terdokumentasi, seperti menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP).

Aksi Strategis: Implementasi GAP untuk Program Prioritas Dinas PUPR harus memilih satu atau dua program prioritas setiap tahunnya untuk dianalisis secara mendalam menggunakan GAP. Dokumen GAP ini akan menjadi bukti dukung yang sangat kuat.

Tabel 2: Contoh Praktis Pengisian *Gender Analysis Pathway* (GAP) untuk Program Pembangunan Trotoar dan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Langkah	Komponen Analisis	Contoh Pengisian untuk Program Pembangunan Trotoar dan PJU di Ruas Jalan X
Langkah 1	Kebijakan/Program/Kegiatan	Program: Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan. Kegiatan: Pembangunan Trotoar dan PJU di Ruas Jalan X. Tujuan Awal: Meningkatkan kelancaran dan estetika kota.
Langkah 2	Data Pembuka Wawasan	Data Kecamatan: Ruas Jalan X dilalui oleh anak-anak sekolah (SD & SMP), pekerja pabrik (mayoritas perempuan yang pulang malam), dan merupakan akses ke pasar tradisional. Laporan Polres: Terdapat 5 laporan penjangbretan di area tersebut dalam 1 tahun terakhir, semuanya terjadi di malam hari. Survei Cepat: Ibu-ibu mengeluh sulit membawa kereta bayi di trotoar yang ada karena banyak lubang dan undakan.
Langkah 3	Isu Gender & Faktor Kesenjangan	Akses: Akses pejalan kaki, terutama perempuan dengan anak, lansia, dan penyandang disabilitas, terhadap trotoar yang aman dan nyaman sangat rendah. Partisipasi: Perempuan tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan desain trotoar dan penentuan titik PJU. Kontrol: Keputusan desain sepenuhnya berada di tangan perencana teknis. Manfaat:

		Manfaat keamanan dari PJU belum dirasakan secara optimal karena banyak titik yang gelap.
Langkah 4 & 5	Sebab Kesenjangan Internal & Eksternal	Internal: Desain standar trotoar tidak mempertimbangkan kebutuhan pengguna kereta bayi/kursi roda. Penentuan titik PJU hanya berdasarkan jarak teknis, bukan titik rawan keamanan. Eksternal: Anggapan bahwa "perempuan sebaiknya tidak keluar malam" membuat isu keamanan bagi perempuan di malam hari tidak menjadi prioritas.
Langkah 6	Reformulasi Tujuan	Tujuan Baru: Meningkatkan aksesibilitas dan keamanan bagi seluruh pengguna jalan (perempuan, laki-laki, anak, lansia, disabilitas) di Ruas Jalan X melalui penyediaan trotoar berdesain universal dan PJU yang memadai.
Langkah 7	Rencana Aksi	1. Melakukan konsultasi publik dengan kelompok perempuan, komite sekolah, dan perwakilan penyandang disabilitas untuk memetakan titik rawan dan kebutuhan desain. 2. Merevisi DED trotoar agar memenuhi standar desain universal (lebar cukup, permukaan rata, dilengkapi <i>ramp</i> dan <i>guiding block</i>). 3. Menambah titik PJU di lokasi-lokasi yang diidentifikasi rawan oleh masyarakat. 4. Memastikan spesifikasi lampu PJU memiliki tingkat terang yang cukup (lux) sesuai standar keamanan.
Langkah 8 & 9	Data Dasar & Indikator Gender	Baseline: Tingkat kepuasan keamanan pejalan kaki malam hari: 2/5. Jumlah keluhan trotoar rusak: 10/bulan. Indikator Kinerja: Persentase peningkatan rasa aman pejalan kaki perempuan di malam hari. Jumlah pengguna kursi roda/kereta bayi yang dapat melintas dengan lancar. Penurunan angka kriminalitas di area tersebut.

2.2. Penganggaran Responsif Gender (ARG)

Perencanaan inklusif harus didukung anggaran yang memadai. Anggaran Responsif Gender (ARG) bukan berarti anggaran terpisah, melainkan alokasi dalam RKA untuk membiayai rencana aksi yang lahir dari analisis GAP. Dokumen

Gender Budget Statement (GBS) adalah alat untuk menjustifikasi anggaran tersebut.

Aksi Strategis: Menyusun GBS untuk RKA Melanjutkan contoh GAP di atas, berikut adalah contoh GBS yang dapat dilampirkan dalam RKA Dinas PUPR.

Tabel 3: Contoh Gender Budget Statement (GBS) untuk Kegiatan Pembangunan Trotoar dan PJU

Komponen	Uraian
Program/Kegiatan	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan / Kegiatan Pembangunan Trotoar dan PJU di Ruas Jalan X
Analisis Situasi	Berdasarkan analisis GAP, teridentifikasi isu rendahnya aksesibilitas trotoar bagi perempuan dengan anak dan penyandang disabilitas, serta tingginya kerawanan keamanan di malam hari akibat PJU yang minim. Hal ini menghambat mobilitas dan meningkatkan risiko bagi perempuan dan anak.
Tujuan Kegiatan	Meningkatkan aksesibilitas dan keamanan bagi seluruh pengguna jalan di Ruas Jalan X.
Jumlah Anggaran Kegiatan	Rp 1.000.000.000
Rencana Aksi & Alokasi ARG	<p>Sub-Kegiatan 1: Pembangunan Trotoar Total Anggaran: Rp 600.000.000 Komponen ARG: Biaya tambahan untuk pembuatan <i>ramp</i> di setiap persimpangan dan <i>guiding block</i> untuk tuna netra. Alokasi ARG: Rp 50.000.000</p> <p>Sub-Kegiatan 2: Pemasangan PJU Total Anggaran: Rp 400.000.000 Komponen ARG: Biaya untuk penambahan 10 titik lampu di area rawan yang diidentifikasi melalui konsultasi publik, dan penggunaan lampu dengan spesifikasi pencahayaan yang lebih tinggi dari standar minimum. Alokasi ARG: Rp 75.000.000</p>
Total ARG	Rp 125.000.000

2.3. Pelaksanaan dan Konstruksi yang Memberdayakan

PUG dalam tahap pelaksanaan tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga prosesnya. Dinas PUPR dapat menciptakan dampak ganda dengan memberdayakan masyarakat selama proses konstruksi.

Rencana Aksi:

- **Program Padat Karya Tunai (PKT) Inklusif:** Memprioritaskan pelibatan perempuan, terutama kepala keluarga, dalam program-program PKT untuk pekerjaan yang sesuai, seperti pemeliharaan rutin drainase atau pengecatan marka jalan. Ini secara langsung memberikan manfaat ekonomi dan pemberdayaan.
- **Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Responsif Gender:** Memastikan semua proyek konstruksi yang diawasi Dinas PUPR menyediakan fasilitas yang

layak bagi pekerja perempuan, seperti toilet terpisah yang bersih dan kebijakan anti-pelecehan di lokasi proyek.

2.4. Pemantauan dan Evaluasi Berbasis Pengguna

Pemantauan proyek PUPR tidak boleh berhenti pada pengecekan progres fisik. Evaluasi harus mengukur apakah infrastruktur yang dibangun benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi semua kelompok pengguna.

Rencana Aksi:

- **Audit Keamanan dan Aksesibilitas:** Setelah proyek selesai, lakukan "Audit Keamanan" (*Safety Audit*) bersama perwakilan komunitas perempuan untuk berjalan di sepanjang trotoar yang baru dibangun pada malam hari dan memberikan masukan langsung. Lakukan juga "Audit Aksesibilitas" dengan mengajak perwakilan penyandang disabilitas untuk mencoba fasilitas yang ada.
- **Integrasi dalam Laporan Kinerja:** Hasil dari audit berbasis pengguna ini, beserta data capaian indikator gender dari GAP, harus secara eksplisit dimasukkan ke dalam Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas PUPR sebagai bukti pelaksanaan PUG yang akuntabel.

Bab 3: Inovasi Infrastruktur Responsif Gender

Untuk meraih nilai tertinggi pada komponen "Inovasi" APE, Dinas PUPR perlu menunjukkan program terobosan yang memiliki daya ungkit, signifikansi, dan dampak yang luas.

3.1. Inovasi 1: Program "Pasar Rakyat Aman dan Nyaman untuk Semua"

Meskipun pengelolaan pasar berada di bawah dinas lain, Dinas PUPR bertanggung jawab atas desain dan konstruksi fisik bangunan pasar. PUPR dapat menjadi inisiator dalam membangun atau merevitalisasi pasar rakyat yang tidak hanya memenuhi standar teknis bangunan, tetapi juga menjadi model fasilitas publik yang responsif gender.

Konsep Program: Mengembangkan prototipe desain standar untuk revitalisasi pasar di Kabupaten Bengkayang yang secara eksplisit mengintegrasikan fasilitas ramah perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Komponen Inovasi:

- **Desain Berstandar:** Desain wajib mencakup:
 - **Toilet Terpisah** untuk laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas yang bersih, terang, dan aman.
 - **Ruang Laktasi** yang privat dan higienis.
 - **Area Bermain Anak** yang aman dan terawasi.
 - **Penerangan yang Memadai** di seluruh area pasar, termasuk area parkir dan lorong-lorong.

- **Aksesibilitas Universal:** Semua area pasar harus dapat diakses dengan mudah oleh pengguna kursi roda dan kereta bayi.

3.2. Inovasi 2: "Jalan Terang Bengkayang": PJU Cerdas Berbasis Kebutuhan Keamanan

Program ini mengubah pendekatan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dari sekadar proyek teknis menjadi strategi keamanan publik yang berbasis data dan partisipasi masyarakat.

Konsep Program: Mengembangkan sistem perencanaan PJU yang memprioritaskan lokasi pemasangan berdasarkan analisis data kriminalitas dan pemetaan partisipatif bersama komunitas perempuan.

Komponen Inovasi:

- **Pemetaan Partisipatif:** Mengadakan lokakarya di tingkat desa/kelurahan untuk memetakan "titik-titik gelap" atau area yang dianggap rawan oleh perempuan.
- **Perencanaan Berbasis Data:** Mengintegrasikan hasil pemetaan partisipatif dengan data lokasi kriminalitas dari Polres untuk membuat Peta Prioritas Pemasangan PJU.
- **Teknologi Cerdas (Jangka Panjang):** Menggunakan teknologi lampu LED hemat energi yang dapat diatur tingkat keterangannya dari jarak jauh, memungkinkan efisiensi energi tanpa mengorbankan keamanan.

Kedua inovasi ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun infrastruktur sosial yang aman, inklusif, dan berkeadilan, sebuah kontribusi fundamental untuk meraih Anugerah Parahita Ekapraya.